

## DPRD Dukung Pemprov DKI Bangun Stasiun Dekat JIS

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, sudah semestinya ada penambahan stasiun KRL Commuter Line di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia pun setuju dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menyediakan akses transportasi umum ke stadion berkapasitas 80 ribu penonton itu.

Menurut dia, JIS akan menjadi kawasan yang lebih baik jika didukung dengan moda transportasi yang terintegrasi. "Masyarakat mesti mudah mengakses JIS dengan berbagai moda angkutan umum," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/9).

Dengan adanya rencana tersebut, sambung dia, lahan parkir yang terbatas di JIS, tetap dapat dinikmati lebih oleh warga karena adanya fasilitas transportasi yang memudahkan. Selain itu, mereka yang nanti ingin menonton sepak bola, misalnya, tak perlu harus membawa kendaraan pribadi.

Ditanya soal pengawasan dan progres lanjutan men-

genai wacana pembangunan itu, Dedi mengklaim, dewan sudah melakukannya. Menurut dia, pengawasan sudah dilakukan oleh Komisi B DPRD DKI, yang ikut mengawal rencana pembangunan stasiun KRL di dekat JIS. Nantinya, stasiun tersebut berada di antara Stasiun Priok dan Stasiun Kampung Bandan.

Menyoal pengelolaan, kata dia, JIS diharapkan bisa dikelola secara terpisah dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Hal itu karena sudah terlalu beragamnya lini bisnis dari PT Jakpro, yang malah nanti tidak maksimal. "Pandangan saya pribadi, JIS ini perlu dikelola oleh perusahaan tersendiri nantinya, baik itu anak perusahaan Jakpro atau BUMD," kata politikus PKS itu.

PT Jakpro menggandeng PT KAI dan PT Transjakarta, dengan melibatkan Dinas Perhubungan DKI untuk membuka rute menuju JIS. Hingga kini, pembukaan transportasi, baik KRL maupun bus Transjakarta masih digodog berbagai pihak. Berdasarkan informasi, rencana integrasi transportasi massal itu, merujuk pada rekomendasi FIFA, sebagai penjang penting demi mobilitas penonton. ● yan

## Pemkot Bekasi Minta DKI Naikkan Dana Kompensasi TPST Bantargebang 100%

JAKARTA (IM) - Pemkot Bekasi bersama Pemprov DKI Jakarta masih membahas kelanjutan kontrak kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang. Salah satu pembahasannya mengenai kenaikan dana kompensasi bagi warga terdampak.

"Kita hanya ingin memformulasikan kita minta ke DKI untuk adanya kenaikan dana kompensasi yang diberikan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana saat dikonfirmasi, Selasa (21/9).

Yayan menuturkan total uang kompensasi yang diterima selama 5 tahun belakangan sekitar Rp 385 miliar. Kemudian, 18 ribu kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan terdampak menerima uang sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Melalui pembaruan kontrak, dia mengusulkan kenaikan dana kompensasi hingga 100 persen. "Kalau perhitungan kita, dengan perhitungan di angka hampir Rp 385 miliar. Mungkin ke depan bisa naik 100 persen, jadi mungkin Rp 800 miliar," sebutnya.

Kemudian, kesepakatan lainnya yang tengah dibahas bersama Pemprov DKI mengenai perbaikan lingkungan sekitar TPST Bantargebang serta pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) TPST Bantargebang.

"Kemudian dana-dana BLT menjadi concern kita. Kemudian pengelolaan PLTSA lebih baik dengan teknologi ramah lingkungan, itu menjadi concern kita. Salah satunya diharapkan terbangunnya PLTSA bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kontrak kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan berakhir Oktober mendatang. Negosiasi kontrak baru pun tengah intens dibahas kedua pemda.

"Dengan Pemkot Bekasi sih, Oktober habisnya, sekarang itu masih dalam pembicaraanannya nih intens, negosiasi-negosiasi dengan pemerintahnya. Tapi itu dengan Pemkot Bekasi," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan saat dimintai konfirmasi.

Yogi menuturkan perjanjian kerja sama (PKS) Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi soal TPST Bantargebang itu ditinjau setiap 5 tahun sekali.

Adapun besaran kompensasi menjadi bagian dari klausul yang tengah dibahas. "Itu salah satu poin klausul yang ada dalam PKS ini, setiap tahun kita kasih hibah ke mereka, tapi dasarnya memang PKS ini," ujarnya. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## BANK SAMPAH DI PERUMAHAN ELITE

Warga bersama petugas bank sampah menimbang sampah di salah satu perumahan elite di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (21/9). Sampah yang dikumpulkan warga nantinya akan dikonversi ke dalam buku tabungan dalam bentuk uang dan sebagai sarana pemanfaatan sampah daur ulang yang dapat menambah pemasukan.

# Anies: Pandemi Covid-19 Terkendali, Tapi Prokes Harus Tetap Tinggi

Pandemi Covid di Jakarta sudah terkendali, tapi bukan berarti setiap orang bisa merasa aman lalu melepas masker, tak rajin cuci tangan, dan tak menjaga jarak begitu saja. Justru aturan protokol kesehatan tetap harus dilakukan oleh setiap orang.

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 su-

dah mulai terkendali, namun menjalankan protokol kesehatan (prokes) harus tetap ketat. Kasus aktif Covid-19 di Jakarta terus menurun, tercatat ada 2.569 orang, dan penambahan kasus barunya di bawah 91 kasus.

"Ini penambahan kasus harian di bawah 100, dan lebih rendah pernah seperti ini tanggal 29 Juni 2020. Jadi sudah lebih dari setahun kita tak pernah penambahan kasus di bawah 100, kemarin itu hanya

tambah 91, artinya kondisi terkendali," ujar Anies di SMP Bakti Mulya 400, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).

Menurutnya, angka positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta saat ini 0,7%, yang mana angka itu merupakan rekor terendah. Padahal, Jakarta pernah mengalami angka positivity rate yang tinggi sebesar 48%.

"Lalu, jumlah tes kita tetap tinggi. 8,4 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO, jadi tes 8 kali lipat standar WHO lalu disebut aman bila di bawah 5 persen dan kita 0,7 persen. Kita bisa mengatakan alhamdulillah atas kerja seluruh pihak kolaborasi kondisi pan-

demi di Jakarta bisa terkendali," tuturnya.

Meski demikian, Jakarta masih punya pekerjaan rumah (PR) yang harus dijalankan. Sebab, pandemi Covid di Jakarta sudah terkendali bukan berarti setiap orang bisa merasa aman lalu melepas masker, tak rajin cuci tangan, dan tak menjaga jarak begitu saja.

Justru aturan protokol kesehatan tetap harus dilakukan oleh setiap orang.

"Kita tak ingin karena kondisi sekarang sudah membaik lalu kita sama-sama santai akhirnya kita kembali lagi seperti di bulan Juni-Juli. Pesannya adalah pandemi terkendali, tapi protokol kesehatan tetap tinggi," pungkasnya. ● yan

## Restoran Boleh Beroperasi Malam Hari, Pengusaha Tunggu Kebijakan DKI

JAKARTA (IM) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwan-tomo mengatakan belum ada informasi dari Pemerintah DKI soal pembukaan restoran malam hari. Dia mengatakan, operasional tempat makan malam hari akan dimulai setelah ada keputusan dari Pemerintah DKI.

"Tunggu pengumuman dulu. Kalau kami mah buka, buka aja. Gampang itu," kata dia saat dihubungi, Selasa (21/9).

Pemerintah pusat men-

tapkan restoran atau rumah makan dan kafe boleh buka malam hari dengan jam operasional 18.00-00.00 WIB waktu setempat. Kebijakan ini berlaku bagi provinsi yang berstatus PPKM Level 3.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menginstruksikan sejumlah pembatasan saat restoran beroperasi malam hari. Pertama, kapasitas maksimal pengunjung 25 persen.

Kedua, waktu makan maksimal 60 menit. Ketiga, seluruh pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi un-

tuk skrining sertifikat vaksin Covid-19.

"Pengaturan teknis diatur oleh pemerintah daerah," demikian Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Imendagri 43/2021 berlaku 21 September hingga 4 Oktober 2021.

Sutrisno belum bisa memastikan kapan restoran malam hari mulai beroperasi. Pemerintah DKI, kata dia, juga belum mengajak bicarakan-

## Pembukaan Taman Kota di Jaksel Tunggu Keputusan Pemprov

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan (Jaksel) masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembukaan kembali taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH) saat penyesuaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Ibu Kota.

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jaksel, Winarto, mengatakan, saat ini 346 taman kota di wilayah tersebut masih belum dibuka untuk umum. "Kebijakan berkenaan pembukaan, kita menunggu itu, kalau misalnya dibolehkan, kita siap buka dan harus siap dibuka, kalau memang regulasi ketentuannya RTH taman sudah demikian," kata Winarto di Jakarta, Selasa (21/9).

Winarto pun mendukung apabila opsi wajib vaksinasi diberlakukan sebagai syarat masuk taman kepada pengunjung. Menurut dia, hal itu akan berdampak baik bagi warga yang melakukan aktivitas di taman apabila sudah dibuka nantinya.

"Kalau vaksin memang diwajibkan, nanti kita persyaratan bagi masyarakat. Contoh sekarang RTH makam, kita sudah minta harus menunjukkan kartu vaksin," kata Winarto.

Kendati belum dibuka, lanjut dia, seluruh taman kota tersebut dipastikan selalu mendapat perawatan dari para

petugas. Tidak hanya pemeliharaan, Winarto menambahkan, petugas juga menanam tanaman baru di setiap taman dan juga di sekitar pembangunan jalan untuk menghijaukan lingkungan setempat.

"Walaupun saat ini tutup, tetap kita lakukan pemeliharaan. Untuk tanaman baru, titik-titiknya ada di Jalan Iskandar Muda, Jalan Gunawarman dan beberapa titik lainnya," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengemukakan, pembukaan taman kota di Ibu Kota dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat akan berdampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Trubus berharap, Pemprov DKI segera membuka kembali operasional taman karena dapat membantu perekonomian para pelaku UMKM.

"Menurut saya harusnya itu dibuka, karena berpengaruh pada pelaku UMKM di sana," kata Trubus di Jakarta, Kamis, (2/9). Trubus menilai, bila pembukaan mal ditujukan untuk ekonomi, pembukaan taman juga demikian yang akan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di sana.

"Kalau mungkin dibuka, idealnya sampai jam 10 malam supaya ada rentang waktu untuk memberi ruang kepada pedagang kecil mendapat keuntungan," katanya. ● yan



FOTO: ANT

## PRODUKSI KERAMIK RUMAHAN

Perajin melakukan sgraffito atau proses aplikasi corak pada kerajinan keramik di Pekunden Pottery, Bojongsari, Depok, Selasa (21/9). Produksi keramik rumahanberbahan tanah liat bakaran tinggi tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp3 juta per buah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan.

## Warga Mulai Euforia, Pemkot Jakpus akan Intensifkan Patroli Malam Hari

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan mengintensifkan patroli pengawasan kerumunan dan protokol kesehatan di titik-titik yang rawan keramaian. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi usai menjau kawasan Bundaran HI dan sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Minggu (19/9) lalu.

Ia menuturkan, dalam peninjauan yang dilakukan usai kegiatan pribadi tersebut, terlihat kerumunan pemuda di jalan dan trotoar. Pemuda berkumpul di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Bendungan Hilir, hingga di dekat

Senayan. "Iya saya pulang dari acara keluarga sambil keliling lihat-lihat. Itu banyak, mereka biasanya kan ngumpul pas malam Minggu atau malam Senin pas hari libur saja. Itu biasanya kan anak-anak muda nongkrong. Ini kan kita masih PPKM, ya tidak boleh dong," ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/9).

Menurut dia, hal ini terjadi karena warga mengalami euforia atas menurunnya wabah covid-19 di Jakarta dan sekitarnya. Terlebih lagi, capaian vaksinasi juga semakin tinggi.

"Mulai ada euforia. Mulai ada pelanggaran ini, jadi banyak warga yang suka berkumpul

itu mulai lebih ramai lagi," jelasnya.

Satpol PP Jakarta Pusat sesungguhnya tidak bekerja selama 24 jam. Batas waktu bekerja Satpol PP hanya sampai pukul 22.00 WIB.

Namun, ia akan meminta Satpol PP Jakpus untuk meningkatkan pengawasan hingga larut malam demi menghalau para pemuda yang berpotensi mengundang kerumunan ini.

"Ya harus mau tidak mau. Daripada nanti kasusnya naik lagi, kita malah masuk ke gelombang ketiga. Nanti rakyat susah lagi. Kita harus tekan betul ini," pungkasnya. ● yan

IDN/ANTARA



## VAKSINASI HEWAN PELIHARAAN SAMBUT HARI RABIES SEDUNIA

Paramedis dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kota Jakarta Selatan menyuntikkan vaksin anti rabies kepada seekor kucing secara gratis di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (21/9). Pemberian Vaksin Rabies gratis tersebut dalam rangka menyambut hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September serta menargetkan wilayah Provinsi DKI Jakarta bebas rabies.

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL**

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL sehubungan dengan perubahan ketentuan terkait jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan sebagai berikut:

1. Reksa Dana Syailendra Dana Kas dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
2. Reksa Dana Syailendra Money Market Fund 6 dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
3. Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Optima dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
4. Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
5. Reksa Dana Syailendra Equity Garuda Fund dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
6. Reksa Dana Syailendra Equity Opportunity Fund dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".
7. Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund dari semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan" menjadi "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

**SYAILENDRA** Jakarta, 22 September 2021  
Manajer Investasi  
PT SYAILENDRA CAPITAL  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan